

---

# Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata *Swedy Beach* di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka

Fitri Syawalia\*, Taslim Fait, Nadila Insira, Dewi Sartika, Sultan Abadi

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.513>

\*Correspondence: Sultan Abadi

Email: [sultandevarmstrong@gmail.com](mailto:sultandevarmstrong@gmail.com)

Received: 18-04-2026

Accepted: 07-05-2026

Published: 29-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja Pemerintah Desa Tambea dalam pengembangan Pantai Swedy sebagai objek wisata di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan narasumber yang terdiri dari pejabat desa, pengelola objek wisata, dan warga Desa Tambea. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam mengembangkan Pantai Swedy belum optimal. Dari segi efisiensi, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih rendah, dan fasilitas umum belum mengalami perbaikan yang signifikan. Mengenai efektivitas, perhatian yang diberikan oleh pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pengelolaan kawasan wisata dinilai kurang memadai, sehingga kebutuhan fasilitas belum terpenuhi. Dari segi keadilan, transparansi dalam pengelolaan kawasan wisata belum diterapkan secara efektif, dan fasilitas yang tersedia masih terbatas. Sementara itu, dalam hal responsivitas, pengembangan pariwisata belum mampu menarik banyak pengunjung akibat kurangnya transparansi pengelolaan serta status proyek pembangunan dan pengembangan di kawasan wisata yang belum selesai. Secara keseluruhan, pengelolaan Pantai Swedy memerlukan perbaikan agar dapat mewujudkan pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kinerja Pemerintah Desa; Pengembangan Pariwisata; Pantai Swedy; Bumdes; Kolaka

**Abstract:** This study aims to examine the performance of the Tambea Village Government in the development of Swedy Beach as a tourist attraction in Pomalaa Subdistrict, Kolaka Regency. The study employs a descriptive method, with informants comprising village officials, tourist attraction managers, and the residents of Tambea Village. The data used includes both primary and secondary data. The results indicate that the village government's performance in developing Swedy Beach has not been optimal. In terms of efficiency, community participation in tourism development remains low, and public facilities have not seen significant improvements. Regarding effectiveness, the attention given by the village government and the Village-Owned Enterprise (BUMDes) to the management of the tourist site is deemed insufficient, resulting in unmet facility needs. Regarding equity, transparency in the management of the tourist area has not been effectively implemented, and available facilities remain limited. Meanwhile, in terms of responsiveness, tourism development has not been able to attract many visitors due to a lack of management transparency and the incomplete status of construction and development projects in the tourist area. Overall, the management of Swedy Beach requires improvement to enable optimal and sustainable development.

**Keywords:** Village Government Performance; Tourism Development; Swedy Beach; Bumdes; Kolaka

## Pendahuluan

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Pengembangan pariwisata terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat (Yoeti, 1997). Indonesia, sebagai negara yang memiliki beragam kekayaan alam dan budaya, menyimpan potensi pariwisata yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Potensi tersebut menjadikan sektor pariwisata sebagai modal strategis dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah desa memiliki peran sentral dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya lokal, termasuk sektor kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pun menegaskan bahwa pengembangan pariwisata bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, kinerja pemerintah desa menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengembangan objek wisata di tingkat lokal.

Salah satu objek wisata yang menyimpan potensi besar namun belum berkembang secara optimal adalah Swedy Beach, yang terletak di Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pantai ini menawarkan keindahan biota laut dan kejernihan air yang berpotensi menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan alam tersebut menjadikan Swedy Beach sebagai aset strategis bagi pengembangan pariwisata desa yang layak untuk dikelola secara profesional.

Upaya pengembangan Swedy Beach telah mendapatkan dukungan dana yang cukup signifikan. Pemerintah desa mengalokasikan dana desa sebesar Rp200.000.000, sementara PT Antam Tbk Pomalaa turut berkontribusi melalui program CSR senilai Rp400.000.000 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 039/0405/SPK-NHG/2021 yang dimulai sejak Juli 2021. Total dukungan pendanaan sebesar Rp600.000.000 tersebut seharusnya menjadi modal yang memadai untuk mewujudkan pengembangan objek wisata yang layak dan berkelanjutan.

Namun demikian, berdasarkan observasi awal, pengembangan Swedy Beach masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat kemajuannya. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti gazebo dan fasilitas umum, kurangnya perhatian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, serta tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi hambatan utama. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat pengunjung dan belum tercapainya tujuan pengembangan potensi wisata desa secara maksimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa. [Nandang Nugraha \(2020\)](#) meneliti kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pantai Potura Kolaka; Riskayana (2012) mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek

wisata Pantai Karsut Jeneponto; serta [Murniati \(2008\)](#) menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Sukoharjo. Ketiga penelitian tersebut secara umum menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan transparansi pengelolaan dalam keberhasilan pengembangan pariwisata.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek partisipasi masyarakat dan kemitraan, sehingga belum secara khusus mengkaji kinerja pemerintah desa sebagai aktor utama pengelola objek wisata. Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis kinerja pemerintah desa di Kabupaten Kolaka menggunakan indikator efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap dalam konteks pengembangan wisata berbasis pendanaan desa dan CSR. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Swedy Beach di Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Analisis dilakukan menggunakan empat indikator kinerja organisasi pelayanan publik yang dikemukakan oleh [Kumorotomo dalam Dwiyanto \(2008\)](#), yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam pengukuran kinerja pemerintah desa di sektor pariwisata. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pemerintah Desa Tambea, Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pengembangan objek wisata yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Swedy Beach. Menurut Sugiyono (2016), metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Lokasi penelitian adalah objek wisata Swedy Beach di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan terdiri dari: (1) Kepala Desa Tambea, (2) Sekretaris Desa Tambea, (3) Kaur Pembangunan, (4) Bendahara Desa Tambea, (5) Ketua BPD, (6) Pengelola Objek Wisata, dan (7) beberapa anggota masyarakat Desa Tambea.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) observasi langsung di lokasi penelitian; (2) wawancara mendalam dengan informan yang dilaksanakan pada bulan September 2025; dan (3) dokumentasi berupa catatan, foto, dan dokumen resmi desa. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Validitas data diuji melalui uji credibility menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, uji transferability, dependability, dan confirmability sesuai dengan standar penelitian kualitatif ([Moleong, \(2007\)](#); [Sugiyono, \(2016\)](#)).

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Efficiency (Efisiensi)***

Efisiensi dalam kinerja pemerintah desa diukur dari keberhasilan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal (Kumorotomo dalam Dwiyanto, 2008). Secara konseptual, efisiensi organisasi publik tidak semata-mata berkaitan dengan penghematan anggaran, melainkan juga mencakup optimalisasi input sumber daya manusia, finansial, dan kelembagaan untuk menghasilkan output layanan yang berkualitas ([Mahmudi, 2010](#)). Dalam konteks pengembangan pariwisata desa, Damanik dan Weber (2006) menegaskan bahwa efisiensi pengelolaan wisata ditentukan oleh seberapa baik pemerintah lokal mengintegrasikan sumber daya alam, manusia, dan modal untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkelanjutan. Pengembangan objek wisata Swedy Beach menggunakan dana desa sebesar Rp 200.000.000 dan bantuan CSR PT. Antam Tbk sebesar Rp 400.000.000, sehingga total anggaran yang tersedia mencapai Rp 600.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pengelola dan pemerintah desa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan program. Kepala Desa Tambea menyatakan bahwa masyarakat diajak untuk memberikan masukan terkait pengelolaan dan penataan kawasan wisata. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal. Sebagian besar masyarakat tidak dilibatkan secara penuh dalam tahap sosialisasi maupun penataan. Fasilitas umum tambahan seperti gazebo dan perluasan area kawasan wisata juga belum terealisasi, meskipun anggaran yang tersedia cukup besar. Kondisi ini sejalan dengan temuan Mardiasmo (2009) yang menyatakan bahwa inefisiensi pengelolaan anggaran publik pada level pemerintahan terkecil seringkali disebabkan oleh lemahnya perencanaan partisipatif dan tidak adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Hardiansyah (2018) menegaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penggunaan dana desa berdampak langsung pada ketidaksesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dan realisasi program. Dalam perspektif teori New Public Management (NPM), Hood (1991) menekankan bahwa efisiensi sektor publik mensyaratkan transparansi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya kepada publik. Absennya kedua elemen ini di Swedy Beach menjelaskan mengapa alokasi anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan perbaikan fasilitas dan kualitas layanan wisata yang dirasakan masyarakat.

### ***Effectiveness (Efektivitas)***

Efektivitas mengacu pada ketercapaian tujuan organisasi (Kumorotomo dalam Dwiyanto, (2008). Pemerintah Desa Tambea memiliki visi 'Sejahtera, Berdaya, dan

---

Berbudaya' dengan misi pengembangan ekonomi kreatif dan inovatif. Pengembangan objek wisata Swedy Beach merupakan salah satu upaya mewujudkan misi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa dan kaur pembangunan, program pengembangan telah dijalankan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan PT. Antam. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan kondisi berbeda. Objek wisata Swedy Beach tidak lagi mendapat perhatian yang memadai baik dari BUMDes Tambea maupun pemerintah desa. Banyak fasilitas dalam kawasan wisata yang belum ditambah, pedagang tidak tertata dengan tertib, dan sarana prasarana tidak diperbaiki sehingga pengunjung kurang berminat untuk datang. Kesenjangan antara pernyataan pejabat desa dan persepsi masyarakat ini mencerminkan apa yang oleh Agus Dwiyanto (2008) disebut sebagai gap implementasi, yakni jarak antara kebijakan yang dirumuskan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Hal ini diperkuat oleh konsep implementation gap dalam studi kebijakan publik oleh Pressman dan Wildavsky (1984), yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh komitmen birokrasi lokal dan konsistensi pengawasan pascaprogram. Penelitian [Sunarso \(2019\)](#) tentang efektivitas BUMDes dalam pengelolaan aset wisata desa di Jawa Tengah menemukan pola serupa, di mana rendahnya kapasitas manajerial BUMDes menjadi faktor utama tidak tercapainya target pengelolaan wisata secara efektif. Sementara itu, dalam perspektif teori organisasi, Robbins dan Coulter (2012) menyatakan bahwa efektivitas organisasi publik tidak cukup diukur dari ada-tidaknya program, melainkan dari sejauh mana output program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan penerima manfaat. Dengan demikian, kondisi Swedy Beach yang stagnan pasca-pencairan anggaran merupakan indikasi nyata bahwa efektivitas kinerja pemerintah desa dalam sektor ini masih jauh dari harapan.

### ***Equity (Keadilan)***

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan serta ketercukupan kebutuhan masyarakat (Kumorotomo dalam Dwiyanto, (2008). Fasilitas yang tersedia di kawasan objek wisata Swedy Beach meliputi 3 unit gazebo, 2 unit WC, dan jembatan wisata biota laut sepanjang 70 meter dengan biaya Rp 134.500.000 dari dana CSR PT. Antam. Tersedia pula wisata kuliner dengan biaya sewa Rp 50.000/bulan, karcis parkir kendaraan roda dua Rp 5.000, dan kendaraan roda empat Rp 5.000.

Terdapat sistem bagi hasil sebesar 30% dari keuntungan BUMDes, dengan rincian 10% untuk pemerintah desa dan 20% untuk BUMDes. Namun, informasi mengenai jumlah penerimaan dan mekanisme pembagian tidak disampaikan secara transparan kepada pemerintah desa dan masyarakat. Pengelolaan parkir dan pendapatan lainnya sepenuhnya ditangani BUMDes tanpa pelaporan yang memadai, yang berimplikasi pada minimnya penambahan fasilitas di kawasan wisata. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam pelayanan publik yang dikemukakan oleh Rawls (1971), yang menekankan bahwa manfaat dari pengelolaan sumber daya publik harus didistribusikan secara adil

---

kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan BUMDes sejalan dengan temuan [Putri dan Setiawan \(2021\)](#) dalam kajian tentang tata kelola BUMDes di Sulawesi, yang menyimpulkan bahwa ketiadaan sistem pelaporan yang baku dan akses informasi yang terbuka menjadi penyebab utama ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola wisata desa. Dalam perspektif Good Governance, United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menetapkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dua pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Absennya kedua pilar ini dalam pengelolaan Swedy Beach tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga mengikis modal sosial dan kepercayaan publik yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pengembangan pariwisata desa ([Putnam, 1993; Ostrom, 1990](#)).

### ***Responsiveness (Daya Tanggap)***

Daya tanggap mengukur sejauh mana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan vital masyarakat dan mempertanggungjawabkan kegiatannya secara transparan ([Kumorotomo dalam Dwiyanto, \(2008\)](#)). Pemerintah Desa Tambea bersama BUMDes telah berupaya mengembangkan potensi desa melalui pengelolaan objek wisata Swedy Beach. Pemerintah desa juga melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan BUMDes.

Namun, daya tanggap pemerintah desa dinilai masih rendah berdasarkan tiga indikator utama: (1) jumlah pengunjung yang datang ke Swedy Beach masih sangat minim, umumnya hanya masyarakat sekitar pada sore hari; (2) proyek pengembangan dan pembangunan kawasan wisata belum selesai; dan (3) transparansi pengelolaan objek wisata kepada masyarakat masih kurang. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah daerah dan peningkatan koordinasi antarlembaga. Rendahnya daya tanggap pemerintah desa ini dapat dianalisis melalui perspektif teori Responsive Governance yang dikemukakan oleh [Ansell dan Gash \(2008\)](#), yang menekankan bahwa pemerintahan yang responsif harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara proaktif, bukan hanya bereaksi terhadap keluhan yang muncul. Dalam konteks pariwisata, Inskip (1991) menyatakan bahwa daya tarik wisata tidak akan berkembang tanpa adanya komitmen berkelanjutan dari pengelola untuk terus merespons perubahan kebutuhan dan ekspektasi wisatawan. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Swedy Beach juga dapat ditelaah melalui konsep tourist motivation yang dikemukakan oleh Crompton (1979) dan Pearce (2005), yang menemukan bahwa keputusan wisatawan berkunjung sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitas, aksesibilitas, dan reputasi pengelolaan destinasi. Penelitian Sugiyama (2011) menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata lokal di Indonesia sangat bergantung pada kapasitas pemerintah desa dalam merespons dinamika pasar pariwisata dan melakukan pembaruan fasilitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, rendahnya daya tanggap pemerintah Desa Tambea bukan

---

sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh aspek strategis keberlangsungan destinasi wisata Swedy Beach dalam jangka panjang.

### **Kesimpulan**

Kinerja pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Swedy Beach di Desa Tambea Kecamatan Kinerja pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Swedy Beach di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka belum berjalan secara optimal pada keempat dimensi yang diukur. Dari segi efisiensi, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penataan kawasan wisata masih terbatas meskipun dana pengembangan yang tersedia tergolong besar, mencerminkan lemahnya mekanisme perencanaan partisipatif dan pengawasan anggaran. Dari segi efektivitas, perhatian BUMDes dan pemerintah desa terhadap kondisi kawasan wisata masih kurang sehingga banyak fasilitas yang belum diperbaiki atau ditambah, menandakan adanya implementation gap antara kebijakan pengembangan dengan realitas di lapangan. Dari segi keadilan, mekanisme bagi hasil antara BUMDes dan pemerintah desa belum disertai transparansi yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan, yang berpotensi mengikis kepercayaan dan modal sosial masyarakat terhadap pengelola wisata. Dari segi daya tanggap, rendahnya jumlah pengunjung dan belum tuntasnya proyek pengembangan mencerminkan respons yang belum memadai terhadap kebutuhan wisatawan maupun masyarakat lokal. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi tata kelola wisata berbasis desa di Indonesia: pemerintah desa perlu memperkuat kapasitas manajerial BUMDes, membangun sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat yang sistematis dalam setiap tahap pengelolaan wisata. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji model tata kelola wisata desa yang berhasil di daerah lain sebagai pembanding, serta meneliti peran pemerintah kabupaten dalam mendorong peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui pendampingan teknis dan regulasi yang lebih operasional, khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis dana desa dan kemitraan CSR.

### **Daftar Pustaka**

- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Murniati. (2008). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Nugraha, N. (2020). *Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Potura Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka*. Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

- 
- Riskayana. (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Karsut di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Yoeti, O. A. (1997). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT Pradnya Paramita.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. *Annals of Tourism Research*, 6(4), 408–424. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(79\)90004-5](https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90004-5)
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. PUSPAR UGM & Andi.
- Hardiansyah. (2018). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1–17.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Inskoop, E. (1991). *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Kristiningrum, E., & Efendi, A. (2020). Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes berbasis potensi lokal. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(2), 115–130. <https://doi.org/10.22146/jkap.57210>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Kedua). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Noor, M. (2012). Membangun desa: Kisah sukses komunitas membangun dari bawah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 1(2), 1–18.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Pearce, P. L. (2005). *Tourist Behaviour: Themes and Conceptual Schemes*. Channel View Publications.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Putri, R. A., & Setiawan, B. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes dalam pengembangan wisata desa di Sulawesi. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 3(1), 45–58.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
-

- 
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management* (11th ed.). Pearson Education.
- Santoso, P. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari berbasis kearifan lokal di Indonesia Timur. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 16(2), 89–105.
- Sinaga, O., & Darmawan, D. (2019). Efektivitas program dana desa dalam peningkatan infrastruktur wisata di desa-desa terpencil. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(1), 67–82.
- Sugiyama, A. G. (2011). *Ecotourism: Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi Alam*. Guardaya Intimarta.
- Sunarso. (2019). Efektivitas BUMDes dalam pengelolaan aset wisata desa: Studi kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan*, 7(1), 33–49.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. UNDP.
- Wahab, S. (2003). *Manajemen Kepariwisata*. PT Pradnya Paramita.
- Wardhana, A., & Prasetyo, E. (2022). Analisis kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan pesisir. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(3), 210–228.
- Wibowo, E. (2016). Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa: Studi pengembangan wisata pantai. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 101–118.
- Wijaya, H. A. S. (2018). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4(2), 119–138.
- Wondoamiseno, R. (2014). Kebijakan otonomi desa dan pengembangan potensi lokal di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 1(1), 55–70.
- Zakaria, F., & Suprihardjo, R. (2014). Konsep pengembangan kawasan desa wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), C245–C249.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.